

Penerapan *Risk – Based Audit* pada Bagian Kredit dalam Mengevaluasi Proses Kredit pada BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa

¹Donna Brigitha Mawikere, ²Chandra Situmeang, ³Ferawati.

Akuntansi Keuangan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

¹ donnabrigitha@gmail.com ² chandrasitumeang@gmail.com ³ ferawati.zhang@wbi.ac.id

Abstract

Decision of Bank Indonesia which obliges commercial banks in Indonesia to conduct risk management in various matters relating to the management and business competition makes management have to aware and adapt to managing the company to be better. Risk Based Audit with a focus on corporate risk is known as a management channel that can be done to enable precise measurement of the company and then use it as a control implementation.

The implementation of Risk-Based Audit is conducted at Rural Bank located in Tanjung Morawa, Deli Serdang. The implementation is to evaluate process and credit procedures, internal control performed by BPR. Credit process and procedures are outlined in five phases which are described in small scope for accurate checks which will be canted on the working papers. Identification of credit phases is done to know the internal analysis which is assessed by LOW, MEDIUM or HIGH. This assessment is for the area of Critical Issues. The Risk-Based Audit role analysis is then used in risk mapping through likelihood tables and internal risk impacts that are useful for mapping risk areas to be avoided, managed or tolerated.

The outcomes of the research shows that internal control in BPR as in properly condition is referred to the absence of major risks that interfere company's performance but still needs to pay attention to the emerging risks which need to be controlled and improved so that risk management can be more properly managed.

Keywords : risk management, risk-based audit, internal control, BPR



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berdasarkan jenisnya dibagi atas dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Bank Indonesia,1998)

Dewasa ini, wajah perbankan hampir tidak bisa dikenali karena perkembangan yang teramat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang berdiri baik dalam skala lokal maupun nasional. Dikenal sebagai institusi yang padat dengan regulasi, deregulasi, dan perubahan internal maupun eksternal institusi perbankan serasa wajib mengikuti gerak perkembangan global perbankan yang terjadi saat ini agar bank bisa lebih beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Pesatnya gerak sektor perbankan di Indonesia khususnya Bank Perkreditan Rakyat memperlihatkan kesempatan baru atau peluang serta meningkatkan tekanan persaingan antar bank

Sebagai salah satu lembaga intermediasi yang memiliki peran menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penting bagi BPR untuk melakukan pengukuran kinerjanya yang berguna untuk menilai tingkat kesehatan sebuah BPR, karena hanya BPR yang sehatlah yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya.

Berdasarkan PBI No. 5/8/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003 dan SEBI No. 5/21/DNDP tanggal 29 September 2003, Bank Umum

di Indonesia mulai Januari 2005 wajib menetapkan manajemen risiko dalam pengelolaan banknya. Hal ini menjadi dasar bahwa bank perlu melakukan prosedur atau perhatian khusus dalam hal mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul.

Manajemen risiko kredit merupakan inti dari kelangsungan hidup bagi sebagian besar bank karena kredit menjadi sumber pendapatan dan komponen utama penghasil bank, disamping itu kredit juga sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah (Tampubolon, 2004). Sesuai keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162 tanggal 31 maret 1995 bahwa bank umum wajib memiliki Kebijakan Pemberian Kredit Bank (KPB) yang dalam hal ini mengharuskan bank agar memperhatikan transaksi kreditnya dengan penilaian yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dengan begitu bank dapat menghindari terjadinya NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit macet yang dapat menyebabkan kerugian pada bank. Pelaksanaan manajemen risiko kredit dalam suatu bank dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko atau *Risk-Based Audit*. Hal ini merupakan alternatif untuk melakukan audit internal bank dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Dunil (2005), *Risk-Based Audit* adalah mata rantai dari manajemen risiko dan berada dalam satu kesatuan dengan manajemen risiko yang perlu dilakukan sebagai kelanjutan dari proses manajemen risiko yang dilaksanakan. *Risk-Based Audit* akan dilakukan dengan identifikasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi lalu evaluasi terhadap risiko-risiko ini akan diantisipasi dan kemudian ditanggulangi dengan penerapan kontrol yang baik. Dengan melakukan audit berbasis risiko, suatu entitas akan memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola dengan baik. *Risk-Based Audit* pada bagian kredit memfokuskan dan memprioritaskan area kredit yang berisiko tinggi kemudian kepada area yang semakin rendah risikonya. Hal ini dapat menghemat waktu, tenaga serta lebih efektif dalam sasarannya.

Penerapan manajemen risiko dengan pendekatan audit berbasis risiko pada bank akan meningkatkan *shareholder value*,

memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian dimasa mendatang, serta meningkatkan daya saing bank. Dalam lingkup perbankan, *Risk-Based Audit* disebut sebagai pendekatan baru yang penerapannya masih terbilang sedikit. Di Sumatra Utara sendiri, penerapan manajemen risiko dengan pendekatan *Risk-Based Audit* juga masih terbilang sedikit atau mungkin belum diterapkan sama sekali. Berdasarkan hal ini, *Risk-Based Audit* dapat menjadi solusi bagi pemerintah dan entitas guna memperbaiki lembaga perbankan yang ada di Indonesia khususnya di Sumatra Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mengevaluasi proses kredit dengan pemetaan *internal risk* melalui penerapan *Risk-Based Audit* pada bagian kredit BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa ?
2. Bagaimana alternatif terhadap temuan dan rekomendasi pada bagian kredit di BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Risk-Based Audit* pada bagian kredit BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas audit internal entitas tersebut.
2. Untuk mengetahui temuan serta rekomendasi yang akan diberikan pada bagian kredit BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan : Dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran guna menentukan bagaimana menerapkan *Risk-Based Audit* yang baik sebagai upaya evaluasi audit internal

dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi audit internal khususnya dibagian kredit BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa serta memberikan pelaporan penerapan *Risk-Based Audit*, temuan penelitian dan rekomendasi untuk perbaikan BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa.

2. Bagi akademika : Hasil penelitian dapat menjadi pedoman atau referensi yang berguna dalam melakukan penelitian lebih lanjut bagi yang berminat mendalami pengetahuan dan pendekatan *Risk-Based Audit*.
3. Bagi penulis : Dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengendalian internal terkait *Risk-Based Audit*.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Risiko Kredit

Risiko (*Risk*) berasal dari bahasa Italia kuno yaitu *resicare* yang berarti berani menghadapi. Menurut peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan risiko bagi bank umum menyatakan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu.

Risiko kredit atau risiko rekanan adalah keadaan ketika debitur atau penerbit instrumen keuangan – baik individu, perusahaan, maupun negara tidak akan membayar kembali kas pokok dan lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit (Greuning, Bratanovic). Risiko kredit dapat dikurangi dengan menerapkan kebijakan untuk membatasi pinjaman pihak terkait dan pemaparan besar kepada pihak terkait.

Manajemen risiko dinilai sebagai prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Dengan manajemen risiko, risiko kredit dapat diantisipasi dan dapat dikurangi. Hal ini erat kaitannya dengan *Risk-Based Audit* yang merupakan salah satu unsur dalam pengendalian (*control*) yang mutlak harus dilakukan dalam proses manajemen risiko. Hal ini tentu saja bermanfaat bagi kesehatan bank. Adapun risiko dalam perkreditan (Dunil, 2005) :

1. Risiko kredit disebut juga sebagai *borrowers default* atau *counter party default*, yaitu gagalnya debitur memenuhi perjanjian yang telah disepakati.
2. Risiko likuiditas (*Liquidity Risk*) : kredit yang gagal dibayar debitur menyebabkan dana bank tidak kembali sehingga dana yang seharusnya dapat dipakai untuk memenuhi kewajiban bank tertahan pada debitur yang bersangkutan sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada pihak ketiga lainnya.
3. Risiko operasional : kemacetan kredit dapat diusahakan *recovery* - nya dari jaminan yang diserahkan tapi karena jaminan tidak diikat, bank tidak dapat melakukan eksekusi sehingga bank tidak mendapat *recovery* - nya.
4. Risiko nilai tukar (*Exchange Rate*) : apabila kredit yang diberikan dalam valas dan nilai tukar rupiah terhadap valas turun, maka kerugian bank menjadi lebih besar dengan penurunan nilai tukar rupiah.
5. Risiko kecurangan (*Fraud Risk*)
6. Risiko reputasi (*Reputation Risk*)

2.2 Risk-Based Audit

Risk-Based Audit adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi (Dunil, 2005). Maka, *Risk-Based Audit* adalah evaluasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan suatu entitas dengan fokus utamanya kepada risiko (termasuk kontrol) yang telah diidentifikasi oleh manajemen. (Tampubolon, 2005)

Dalam konsep *Risk-Based Audit*, semakin tinggi risiko suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Perhatian auditor lebih difokuskan kepada risiko bisnis yang dihadapi oleh bank apakah risikonya tinggi (*high risk*), sedang (*medium risk*) ataupun rendah (*low risk*). Adapun rekomendasi perbaikan bukan didasarkan pada kelemahan *internal control* melainkan bagaimana mengurangi risiko bisnis sesuai tingkatan risiko riil yang dihadapi setiap divisi entitas (Dunil, 2005).

2.2.1 Tujuan Risk-Based Audit

Tujuan *Risk-Based Audit* secara umum yaitu untuk mengurangi risiko, mengantisipasi risiko potensial dalam rangka melindungi perusahaan dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi (Dunil, 2005). Menurut Dunil, tujuan *Risk-Based Audit* adalah :

1. Mengurangi risiko (*mitigate current risk*) dan memberi arah risiko yang dapat memengaruhi bank sehingga dapat membantu bank dalam mengelola risiko bisnisnya.
2. Antisipasi terhadap area dengan risiko potensial
3. Meningkatkan identifikasi risiko yang mungkin terlewatkan
4. Meningkatkan identifikasi atas kemungkinan kecurangan
5. Melindungi bank (*protect the bank*) dalam menghadapi risiko dengan antisipasi dari kerugian yang akan dialami.

Risk-Based Audit dalam pelaksanaannya wajib menetapkan fokus dan prioritas pada area yang memiliki risiko tinggi yang kemudian baru dialokasikan pada tingkatan risiko lapis berikutnya dan akhirnya pada area dengan risiko yang paling rendah.

Penilaian tingkatan risiko yang ada pada area bisnis bank dilihat dari rating. Semakin tinggi rating, maka risiko tinggi begitu sebaliknya rendahnya rating menggambarkan risikonya rendah. Pengukuran risiko dilakukan dengan menetapkan *score* yang mengacu pada *internal credit risk rating* dengan mempertimbangkan hal-hal berikut (Tampubolon, 2005) :

1. Karakteristik setiap jenis kredit, kondisi keuangan debitur, dan struktur kredit yang diperjanjikan dalam perjanjian.
2. Potensi terjadinya kegagalan membayar
3. Besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat gagal bayar
4. Aspek jaminan dan *marketability*-nya.
5. Kesiapan dan kemampuan bank dalam menyerap potensi kegagalan yang diperkirakan.

Menurut Dunil (2005) sistem penilaian *rating* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan aspek yang dinilai
2. Menentukan bobot penilaian

3. Sistem *scoring* dengan menetapkan setiap faktor yang dinilai.

2.2.2 Working Papers dan Mapping Risk

Working Papers adalah pendukung laporan audit sebagai sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan (supervisi) hasil audit. Tujuan penyusunan *Working Papers* adalah sebagai berikut (Tampubolon, 2005) :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan tugas-tugas audit untuk memperlihatkan keseragaman proses audit
2. Menjadi pendukung bagi setiap temuan dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan auditor.
3. Menjadi dasar dan pengendalian bagi penelusuran tindak perbaikan (*corrective action tracking*)
4. Memfasilitasi tugas review dengan menjadi alat evaluasi
5. Menjadi pedoman bagi pelaksanaan audit berikutnya.

Menurut Dunil (2005), penyusunan dan dokumentasi

Working Papers terbagi atas dua hal yaitu :

1. Rapi, sehingga memudahkan penggunaannya. WP harus lengkap, jelas, dan mudah dimengerti sehingga memudahkan pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut.
2. Sistematis, disusun berdasarkan kronologis kejadiannya. WP harus diberi *index* dan *cross index* yang dapat menggunakan *alphabet* (A to Z) atau *numerical* (I;II dst.nya atau 1, 2, 3 dst-nya) atau kombinasi (I A, II A; II B dst.nya).

Pemetaan Risiko adalah suatu skema untuk memetakan pola resiko yang mungkin didapati suatu kegiatan atau kejadian. *Mapping risk* atau pemetaan risiko diperlukan baik pada saat setup perdana unit kerja internal audit, baik sebelum mengawali kerja baru internal audit juga ketika akan melakukan pemeriksaan perdana. Tujuan pemetaan dengan melihat sebaran dari berbagai titik krisis menurut Kumaat (2011) terdiri dari :

1. Berbagai *Critical Risk Point*, yaitu setiap objek pengawasan yang mengandung risiko potensial dengan dampaknya yang signifikan.

2. Berbagai *Critical Control Point*, yaitu setiap objek pengawasan yang mengandung ancaman terjadinya “*system break*”

Hubungan *Risk-Based Audit* dengan titik krisis diawali dengan identifikasi kemungkinan risiko pada setiap tahap kredit yang akan diperiksa. Setelah itu setiap risiko pada kredit dijabarkan akibat apa yang akan diderita bank apabila risiko tersebut direalisasi. Hal selanjutnya yaitu dengan melihat hubungan antara risiko dengan faktor penyebab terjadinya risiko. Pengukuran risiko dengan menggunakan score dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Score Penilaian Risiko

Score	Penilaian Risiko	DAMPAK RISIKO
3	<i>High</i> (Tinggi)	Sangat potensial menjadi masalah Lingkungan pengendalian internal yang lemah Memerlukan perubahan yang ekstensif
2	<i>Medium</i> (Sedang)	Mungkin menjadi masalah Pengendalian internal kurang berperan Memerlukan beberapa perubahan
1	<i>Low</i> (Rendah)	Kemungkinan tidak menjadi masalah Pengendalian internal cukup kuat Tidak memerlukan perubahan

Sumber : Telah Diolah Kembali

Selanjutnya pemetaan pada suatu risiko dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Diagram Pemetaan Risiko

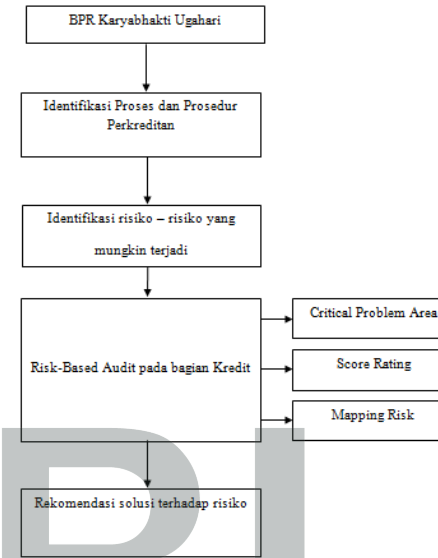
Likelihood of Risk	HIGH	Dikelola	Dihindari	Dihindari
	MED	Diterima	Dikelola	Dihindari
	LOW	Diterima	Diterima	Dikelola
		LOW	MED	HIGH
		IMPACT		

Sumber : <https://www.expertprogrammanagement.com/2009/06/visualise-risks-using-a-risk-map/>

Pemetaan risiko dikelompokkan dalam sembilan area dengan tiga area berwarna hijau menggambarkan saran risiko masih dapat diterima, tiga area berwarna kuning yang menggambarkan risiko yang masih dapat dikelola, dan terakhir tiga area dengan warna merah yang memiliki risiko yang harus dihindari dengan melakukan pencegahan agar tidak merugikan pihak bank. Analisis pemetaan risiko akan dilakukan melalui :

1. Penaksiran kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko (*likelihood*).
2. Estimasi dampak potensial (*impact*) apabila risiko tersebut benar-benar terjadi dengan memperhitungkan besarnya kemungkinan material maupun non material.

2.2. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

3. METODE

3.1. Tempat, Waktu, Metode, Objek, Teknik Pengumpulan data, Jenis dan Sumber data yang digunakan

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di BPR Karyabhakti Ugahari yang beralamat di JL. Pasar Inpres No. 71 Tanjung Morawa, Deli Serdang selama 2 bulan dimulai pada bulan November hingga bulan Desember 2017.

3.2 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran, uraian, penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Peneliti mengamati dan mengidentifikasi risiko kredit pada objek penelitian yang kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan perusahaan.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti disini adalah Bank Perkreditan Rakyat Karyabhakti Ugahari yang beralamat di JL. Pasar Inpres No. 71 Tanjung Morawa, Deli Serdang. Fokus penelitian yakni mengenai penerapan *Risk-Based Audit* pada bagian kredit guna mengevaluasi proses kredit entitas.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian berupa informasi mengenai masalah yang diteliti diantaranya dokumen yang berisi tentang struktur organisasi dan *job description* bagian kredit serta kertas kerja pada semua tahapan perkreditan. Data sekunder, yaitu data eksternal yang dikumpulkan dari BPR Karyabhakti Ugahari sendiri, studi kepustakaan melalui buku bacaan, jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan terkait penelitian ini adalah dengan cara :

1. Dokumentasi – Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis catatan atau dokumen yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti.
2. Wawancara – Wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang atau pihak lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.
3. Teknik observasi – Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara detail. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.
4. Penelitian kepustakaan – metode pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku, literatur, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Pengumpulan data yang dilakukan diperoleh dengan beberapa langkah dengan pengumpulan data pertama mengenai gambaran umum, struktur organisasi, tugas, tanggungjawab dan ketentuan bagian kredit dengan tujuan mengetahui kondisi nyata perusahaan, persyaratan kredit dan *job description* bagian kredit. Kedua, mengenai pengendalian internal pada bagian kredit bank. Ketiga, identifikasi dan pemeriksaan proses dan prosedur perkreditan. Keempat, identifikasi kemungkinan risiko-risiko pada setiap tahapan kredit. Selanjutnya, pengukuran identifikasi kemungkinan risiko melalui *Risk-Based Audit* yang kemudian digunakan untuk mengetahui *Critical Problem Area* bagian kredit melalui pemetaan risiko. Terakhir, pengumpulan data terkait temuan, dan rekomendasi pada bagian kredit yang tujuannya dalam menganalisa keadaan nyata perusahaan dan rekomendasi sebagai perbaikan untuk perusahaan. Langkah – langkah penelitian yang akan dikerjakan ini dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Langkah – Langkah Penelitian

No	Pertanyaan Penelitian	Metode Pengambilan Data	Sumber Data	Tujuan
1.	Bagaimana gambaran umum, struktur organisasi, tugas, tanggung jawab dan ketentuan bagian kredit pada BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa?	Analisis Dokumen	Dokumen : <ul style="list-style-type: none">- Struktur organisasi & <i>job description</i> bagian kredit- Jenis-jenis pinjaman kredit- Batas wewenang memutus kredit, Kolektabilitas Kredit- Ketentuan dokumen persyaratan kredit untuk jaminan BPKB atau SHM- Standar penilaian jaminan SDM : <ul style="list-style-type: none">- Account Officers- Administrasi Kredit	Untuk mengetahui kondisi nyata perusahaan mengenai pemisahan fungsi, struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, wewenang, peraturan dan kebijakan tertulis perusahaan serta internal kredit pada

			<ul style="list-style-type: none"> - Penagihan - Bagian marketing dan kredit - Internal control - Direktur 	bagian kredit.
2	Bagaimana pengendalian internal pada bagian kredit BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa?	Analisis Dokumen	<p>Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Permohonan Kredit - Dokumen - dokumen persyaratan kredit untuk jaminan BPKP atau SHM - Proposal permohonan kredit atau laporan kunjungan debitur - Laporan penilaian objek jaminan - Dokumentasi/ foto jaminan - Memorandum analisa kredit - Cek kelayakan berkas kredit - Memorandum persetujuan kredit - Memorandum pencairan kredit. <p>Observasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan kredit, Survey kredit, penilai jaminan dan analisis kredit - Pemeriksaan kredit s/d persetujuan atau penolakan kredit - Pengikatan kredit, Pencairan kredit, dokumentasi kredit. <p>SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Account Officers - Penilai jaminan dan 	<p>Dilakukan untuk mengetahui pengendalian internal yang ada.</p> <p>Observasi dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengendalian internal yang telah ditetapkan dengan hasil dilapangan.</p> <p>Interview dilakukan untuk</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - analisis kredit - Administrasi Kredit - Legal - Bagian marketing dan kredit, <i>internal control</i> dan Direktur. 	mengetahui pengendalian internal menurut bagian kredit
3	Bagaimana identifikasi dan pemeriksaan proses dan prosedur perkreditan pada BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa?	Analisis Dokumen Observasi, dan wawancara	<p>Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi permohonan kredit - Proposal permohonan kredit atau laporan kunjungan debitur - Laporan penilaian objek jaminan (BPKB dan SHM) - Dokumentasi foto jaminan - Memorandum analisa kredit - Cek kelayakan berkas kredit - Memorandum persetujuan dan pencairan kredit 	Untuk mengetahui fungsi dokumen dalam setiap tahapan perkreditan serta proses dan prosedur perkreditan.
4	Bagaimana mengidentifikasi kemungkinan risiko – risiko pada setiap tahapan kredit di BPR Karyabhakti Ugahari?	Analisis Dokumen	<p>Dokumen :</p> <p>Kertas kerja pada tahap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan kredit - Survey kredit - Penilai jaminan dan analisis kredit - Pemeriksaan kredit s/d persetujuan/penolakan kredit - Pengikatan kredit - Pencairan kredit - Dokumentasi kredit 	Untuk melakukan identifikasi risiko pada setiap tahapan perkreditan.
5	Bagaimana melakukan pengukuran	Analisis Dokumen	<p>Dokumen :</p> <p>Kertas kerja pada tahap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan kredit 	Untuk melakukan pengukuran

	identifikasi kemungkinan risiko melalui <i>Risk – Based Audit</i> untuk mengetahui <i>Critical Problem Area</i> bagian kredit BPR Karyabhakti Ugahari		<ul style="list-style-type: none"> - Survey kredit - Penilai jaminan dan analisis kredit - Pemeriksaan kredit s/d persetujuan atau penolakan kredit - Pengikatan kredit - Pencairan kredit - Dokumentasi kredit 	identifikasi kemungkinan risiko melalui <i>Risk-Based Audit</i> untuk mengetahui <i>Critical Problem Area</i> .
6	Bagaimana temuan, implikasi manajerial dan rekomendasi dengan penerapan <i>Risk – Based Audit</i> dalam mengevaluasi transaksi kredit pada bagian kredit di BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa?	Analisa Dokumen dan Observasi	Dokumen : Kertas kerja pada tahap: <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan kredit - Survey kredit - Penilai jaminan dan analisis kredit - Pemeriksaan kredit s/d persetujuan atau penolakan kredit - Pengikatan kredit - Pencairan kredit - Dokumentasi kredit 	Analisa dokumen dilakukan agar temuan, implikasi manajerial dan rekomendasi yang diberikan dapat akurat dan sesuai dengan kondisi dilapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah dan Profil Bank Perkreditan Rakyat Karyabhakti Ugahari

Bank Perkreditan Rakyat Karyabhakti Ugahari berdiri pada tanggal 28 Oktober tahun 1992 dan berlokasi di Jl. Pasar Inpres No. 71, Tanjung Morawa. BPR Karyabhakti Ugahari selaku kantor pusat memiliki kantor cabang yang berada di Tebing Tinggi dan kantor kas yang ada di Lubuk Pakam. Bahasan dalam skripsi ini fokus pada kantor pusat di Bank Perkreditan Rakyat Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa yang selanjutnya disebut BPR KBU.

4.2 Jenis – Jenis Layanan BPR KBU

1. Jenis Tabungan dan Deposito

Sebagai salah satu bank perkreditan rakyat swasta yang memberikan layanan kepada konsumen yaitu para nasabah yang berasal dari berbagai kalangan, BPR KBU menawarkan layanan dalam bentuk tabungan dan deposito yaitu :

1. Tabungan Umum : Setoran awal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-
2. Tabungan Pelajar : Setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-
3. Deposito : merupakan simpanan masyarakat di BPR KBU yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank. Nilai nominal deposito minimal yang ditawarkan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu deposito yang tersedia yaitu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan, dan jangka waktu 1 bulan untuk deposito perpanjangan.

2. Fasilitas Perkreditan

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar lingkup BPR

KBU dan guna meningkatkan permodalan BPR KBU menyediakan fasilitas perkreditan sebagai berikut :

1. Pinjaman sliding atau menurun : Pinjaman ini menggunakan sistem bunga menurun yang mana

perhitungan beban bunga dihitung ditiap akhir periode pembayaran angsuran, berdasarkan saldo pinjaman.

2. Pinjaman Anuitas : Dalam pinjaman anuitas, angsuran kredit bulanannya bersifat tetap. Namun komposisi bunga dan pokok angsuran akan berubah tiap bulannya.
3. Pinjaman Persekot : Pinjaman ini juga menggunakan suku bunga menurun yang bunganya wajib dibayar per bulan, hanya saja debitur tidak wajib membayar pokok pinjaman setiap bulannya, namun harus melunasi pembayaran saat jatuh tempo.
4. Pinjaman Flat atau Tetap : Pinjaman ini menawarkan sistem pembayaran dengan porsi bunga dan angsuran yang sama setiap bulannya.
5. Pinjaman Prorata : Pinjaman ini dikhususkan bagi karyawan BPR KBU dengan pembayaran bunga menggunakan sistem bunga menurun.

Calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit wajib melengkapi syarat – syarat seperti KTP atau SIM yang masih berlaku, Surat Keterangan Usaha, Bukti Pemilikan Agunan berupa BPKB, Surat Kepemilikan Tanah dan atau bangunan serta hal lainnya terkait permohonan untuk mengajukan kredit.

3. Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) BPR KBU

Tabel 4.1 Batas Wewenang Memutus Kredit

Tingkat	Jumlah / Plafond Kredit	Wewenang Memutus
I	0 s/d Rp. 25.000.000,-	Kabag Kredit (KP)
	0 s/d Rp. 50.000.000,-	Pimpinan Cabang (KC)
II	Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Direktur Kredit (KP)
III	>Rp. 100.000.000,-	Direktur Utama, Direktur Kredit (KP)

4. Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit merupakan kualitas aktiva produktif debitur yang dikategorikan dalam kategori berikut :

1. Kredit Lancar : Kredit dikatakan lancar apabila semua kewajiban hutang, debitur, baik pokok maupun bunga serta denda terhadap BPR KBU telah terpenuhi.
2. Kredit Bermasalah : Kredit dikatakan bermasalah atau dalam kategori kurang lancar dan diragukan apabila debitur tidak melakukan kewajibannya dan wajib memenuhi sanksi yang diberikan.
3. Kredit Macet : Kredit dikatakan macet apabila debitur tidak melakukan kewajiban lebih dari yang ditentukan.

4.3 Identifikasi Proses dan Risiko Perkreditan

4.3.1 Identifikasi Proses dan Prosedur Perkreditan

Identifikasi yang dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab setiap bagian perkreditan, analisa pengendalian internal berupa uraian naratif kemudian dibagi dalam tahapan – tahapan agar penelitian lebih terarah dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan.

- Permohonan kredit berupa formulir permohonan kredit
- Pencatatan permohonan kredit dalam buku Register Permohonan kredit
- Pelaporan permohonan kredit
- Survey pendahuluan tentang kebenaran data calon debitur.

2. Tahap Penilaian Permohonan Kredit

- Pelaksanaan Survey Kredit
- Kelengkapan persyaratan dan kebenaran Formulir Permohonan Kredit
- Informasi Data calon debitur dalam Survey kredit
- Analisis Kredit

3. Tahap Pemutusan

- Pengkajian ulang semua data permohonan kredit
- Pertimbangan persetujuan atau penolakan kredit oleh komite kredit

- Persetujuan komisaris terkait permohonan kredit yang melebihi batas kewenangan direksi melalui NRK.

4. Tahap Realisasi

- Penyiapan dokumen kredit
- Pengikatan jaminan dalam bentuk perjanjian
- Pencairan kredit oleh bagian administrasi Kredit

5. Tahap Penatausahaan

- Penatausahaan berkas – berkas perjanjian dan agunan asli serta dokumen terkait lainnya oleh bagian Administrasi
- Penyimpanan berkas SPK dan agunan asli debitur oleh kabag operasional.

Pada proses dan prosedur perkreditan terdapat lima tahapan yang berlaku dan perincian serta bagian yang berperan akan dirincikan dalam scope yaitu bagian kecil dari area audit. Tahapan – tahapan perkreditan yang diidentifikasi yaitu dari Tahap Persiapan. Tahap ini memaparkan proses permohonan kredit yang diberikan oleh AO atau CS berupa formulir permohonan kredit yang kemudian akan dicatat oleh bagian administrasi ke dalam buku Register Permohonan Kredit. Setelah dicatat, hal ini menjadi bentuk bahwa permohonan kredit telah sampai pada tahap pelaporan yang kemudian akan dilakukan survey awal oleh bagian AO untuk mengetahui kebenaran data calon debitur.

Setelah melalui tahapan persiapan dan kredit memenuhi persyaratan awal, tahapan selanjutnya adalah tahap penilaian permohonan kredit. Tahap ini adalah tahap setelah survey awal dilakukan oleh AO, dan kemudian dilanjutkan pelaksanaan survey yang dilakukan oleh tim survey BPR untuk memastikan kebenaran formulir permohonan kredit yang diajukan. Kebenaran formulir mulai dari kelayakan keadaan usaha dalam hal kemampuan membayar pinjaman kredit, kelengkapan persyaratan hingga karakter calon debitur. Setelah proses survey, tim analisis kredit bertugas dalam menilai kelayakan usaha, agunan dan hal lainnya lalu melaporkannya ke kabag kredit yang nantinya akan diserahkan ke komite untuk pemberian keputusan .

Tahapan selanjutnya adalah tahap pemutusan. Tahap dimana semua data permohonan kredit dikaji ulang oleh bagian komite kredit apakah permohonan kredit layak dikabulkan seluruhnya, lebih kecil dari yang dimohonkan atau permohonan harus ditolak. Keputusan oleh komite kredit dituangkan dalam *Offering letter kredit* . apabila ada permohonan kredit yang melebihi batas kewenangan, maka komite meminta persetujuan komisaris yang disajikan melalui Nota Rekomendasi Kredit.

Tahap Realisasi adalah tahap dimana calon debitur telah memenuhi semua persyaratan peminjaman kredit dan berhak menerima pinjaman dari BPR. Tahap ini ditandai oleh terbitnya perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh debitur. Persiapan dokumen kredit dilakukan oleh bagian administrasi yang dilakukan sebelum menghubungi calon nasabah dan membuat janji untuk kepastian kedatangan debitur. Setelah proses dokumentasi selesai, pencairan kredit sudah bisa dikeluarkan oleh *teller*.

Tahap terakhir adalah Tahap Penatausahaan. Tahap ini merincikan penyempurnaan proses administrasi dengan menyimpan berkas – berkas perjanjian dan agunan asli debitur dan backup semua dokumen perkreditan untuk selanjutnya diberikan ke kabag operasional untuk disimpan.

Identifikasi prosedur perkreditan dilakukan untuk mengetahui analisa lebih lanjut pada setiap tahapan kredit. Penaksiran kriteria pengukuran dan penilaian risiko (*low, medium , dan high*) yang penulis terapkan dalam kertas kerja diperoleh dari kertas kerja penelitian terdahulu yang merujuk pada informasi narasumber dengan topik dan objek penelitian yang sama yaitu penerapan Risk-Based Audit pada bagian kredit untuk mengevaluasi proses kredit dengan memetakan internal risk pada BPR.

Dokumentasi kertas kerja yang penulis buat disusun dengan menggunakan kombinasi *alphabet* dan *numerical* yaitu A1, A2, dst-nya sebagai kertas kerja tahap pertama prosedur perkreditan disertai rincian *scope* masing – masing tahapan. B2, B3, dst-nya sebagai kertas kerja tahap kedua dan seterusnya disesuaikan dengan tahapan perkreditan BPR KBU dan kertas kerja penelitian terdahulu. Pemeriksaan serta hasil analisa lebih lanjut BPR KBU akan

dilakukan pada kertas kerja (*workingpaper*) yang menghasilkan temuan risiko internal sebagai berikut :

Tabel 4.2 Internal Risk Tahapan Perkreditan BPR KBU

	No.	Tahap Persiapan
A	1	Kesalahan pengisian Formulir Permohonan Kredit
	2	Kelemahan dala pencatatan permohonan kredit dalam buku registrasi
	3	Kelemahan dalam pelaporan permohonan kredit
	4	Kelemahan dalam pemeriksaan kelengkapan syarat formulir permohonan kredit pada survey pendahuluan
		Tahap Penilaian Permmohonan Kredit
B	1	Kelemahan dalam pelaksanaan survey kredit tanpa disertai surat penugasan dari bank
	2	Ketidaklengkapan persyaratan informasi data calon debitur
	3	Kelemahan dalam pengecekan data calon debitur yang jelas dan lengkap ke SID
	4	Kesalahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan analisa kredit
		Tahap Pemutusan
C	1	Ketidaktelitian pengkajian semua data terkait permohonan kredit
	2	Kesalahan dalam pertimbangan persetujuan atau penolakan kredit
	3	Kesalahan dalam pertimbangan persetujuan oleh komisaris terkait permohonan yang melebihi batas kewenangan direksi
		Tahap Realisasi
D	1	Ketidaktelitian pemeriksaan dokumen – dokumen terkait perjanjian kredit
	2	Kelemahan hukum dokumen – dokumen pengikatan kredit
	3	Kesalahan dalam pembuatan slip pencairan kredit berdasarkan pengecekan kembali data pencairan kredit
		Tahap Penatausahaan
E	1	Kelemahan dalam pengarsipan dokumen – dokumen asli dan dokumen cadangan oleh bagian administrasi
	2	Kelemahan dalam penyimpanan berkas asli oleh kabag operasional

4.3.2 Analisis Critical Problem Area dengan Penerapan Risk - Based Audit

Berdasarkan kriteria pengukuran risiko dan penilaian risiko dalam kertas kerja diperoleh analisa risiko yang dirangkumkan dalam tabel 4.3 dan dibubuhkan opini dalam memudahkan identifikasi *critical problem area*. Opini yang diberikan berdasarkan pendapat pribadi penulis yaitu dari yang tertinggi HIGH bernilai 3, MED bernilai 2, dan LOW bernilai 1. Berikut kemungkinan penilaian risiko yang diperoleh dari kertas kerja.

Tabel 4.3 Kemungkinan Penilaian Risiko

Tahapan	Kertas Kerja	Scope Risiko	Penilaian Risiko			Opini
			LOW	MED	HIGH	
Persiapan	A1	Permohonan kredit	1			1
	A2	Pencatatan Formulir Permohonan	1			1
	A3	Pelaporan Formulir Permohonan	1			1
	A4	Survey Pendahuluan	1			1
			Total Penilaian			4
			Dibagi jumlah scope risiko			4
			Nilai risiko pada tahap persiapan			1,0
Penilaian Permohonan kredit	B1	Pelaksanaan Survey Kredit		2		2
	B2	Kelengkapan persyaratan dan kebenaran Formulir Permohonan Kredit	1			1
	B3	Informasi Data calon debitur dalam Survey kredit	1			1
	B4	Analisis Kredit	1			1
			Total Penilaian			5
			Dibagi jumlah scope risiko			4
			Nilai risiko pada tahap persiapan			1,25
Permutusan	C1	Pengkajian ulang semua data permohonan kredit	1			1
	C2	Pertimbangan persetujuan atau penolakan kredit oleh komite kredit	1			1
	C3	Persetujuan komisaris terkait permohonan kredit yang melebihi batas kewenangan direksi melalui NRK.	1			1

Total Penilaian					3
Dibagi jumlah scope risiko					3
Nilai risiko pada tahap persiapan					1,0
Realisasi	D1	Penyiapan dokumen kredit			1
	D2	Pengikatan jaminan dalam bentuk perjanjian			1
	D3	Pencairan kredit oleh bagian administrasi Kredit			1
Total Penilaian					3
Dibagi jumlah scope risiko					3
Nilai risiko pada tahap persiapan					1,0
Penatausahaan	E1	Penatausahaan berkas – berkas perjanjian dan agunan asli serta dokumen terkait lainnya			1
	E2	Penyimpanan berkas SPK dan agunan asli debitur oleh kabag operasional			1
Total Penilaian					2
Dibagi jumlah scope risiko					2
Nilai risiko pada tahap persiapan					1,0

Berdasarkan tabel kemungkinan penilaian risiko, penulis mengurutkan tahapan perkreditan dari nilai risiko terbesar hingga terkecil yakni pada tahap penilaian permohonan perkreditan dan selanjutnya pada empat tahap selanjutnya dengan nilai yang sama yaitu tahap persiapan, pemutusan, realisasi dan penatausahaan. Berikut urutan nilai risiko :

Tabel 4.4 Urutan Nilai Risiko

No.	Tahapan	Penilaian Risiko
1.	Penilaian Permohonan Perkreditan	1,25
2.	Persiapan	1,0
3.	Pemutusan	1,0
4.	Realisasi	1,0
5.	Penatausahaan	1,0

4.3.3 Analisis Peranan Risk – Based Audit dalam Pemetaan Risiko

Pemetaan risiko digambarkan melalui area risiko yang sebaiknya dihindari, dikelola, ataupun diterima. Dalam melakukan analisis pemetaan risiko ini, dibutuhkan adanya penaksiran kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko yaitu *likelihood* dan *impact*. Penaksiran ini dirincikan dalam kategori *High*, *Medium*, ataupun *Low* yang sesuai dengan keadaan perusahaan. Penaksirannya sebagai berikut :

Tabel 4.5 Skala Unsur Risiko Likelihood dan Impact

Unsur Risiko	Kategori	Alasan
Likelihood	Low	Apabila penaksiran kemungkinan terjadinya suatu risiko kecil atau jarang terjadi.
	Medium	Apabila penaksiran kemungkinan terjadinya suatu mungkin terjadi tetapi masih dalam batas kewajaran
	High	Apabila penaksiran kemungkinan terjadinya suatu risiko sering kali terjadi .
Impact	Low	Apabila dampak risiko yang mungkin terjadi tidak terlalu mengganggu proses dan prosedur suatu kegiatan
	Medium	Apabila dampak risiko yang mungkin terjadi agak mengganggu proses dan prosedur suatu kegiatan
	High	Apabila dampak risiko yang mungkin terjadi mengganggu proses dan prosedur suatu kegiatan

Berikut ini disajikan tabel *likelihood* dan *impact* dari *internal risk* yang merincikan pemetaan risiko dan pengelolaan risiko yang dapat dilakukan. Internal risk tahapan perkreditan didapat dari tabel 4.2 yang telah dibuat. Kriteria *likelihood* dan *impact* diperoleh dari informasi perusahaan serta identifikasi proses dan prosedur perkreditan yang telah di analisa

Tabel 4.6 Likelihood and Impact Internal Risk

No	Internal Risk	Likelihood	Impact	Pemetaan Risiko
1.	Kesalahan pengisian Formulir Permohonan Kredit	Skala Risiko : LOW Kemungkinan terjadinya tidak ada karena calon debitur didampingi oleh CS dalam pengisian Formulir Permohonan Kredit	Skala Risiko : LOW Dampak terjadinya risiko kecil karena dilakukan pengecekan kembali data terkait Formulir Permohonan Kredit berulang sebelum di serahkan ke AO sehingga kemungkinan fraud dan error rendah.	Risiko dapat diterima karena BPR KBU memiliki pengendalian internal yang baik.
2	Kelemahan dalam pencatatan permohonan kredit dalam buku registrasi	Skala Risiko : MEDIUM Kemungkinan terjadi ada dalam batas wajar karena mungkin terjadi salah penulisan	Skala Risiko : LOW Dampak terjadinya risiko kecil, karena bagian adminstrasi akan melakukan pemeriksaan dan melakukan pencocokan permohonan.	Risiko dapat dikelola dengan melakukan kerjasama antara CS dan bagian adminstrasi dalam melakukan pemeriksaan pencatatan permohonan
3.	Kelemahan dalam pelaporan permohonan kredit	Skala Risiko : MEDIUM Kemungkinan terjadi ada dalam batas wajar karena pelaporan dilakukan setiap hari.	Skala Risiko : LOW Dampak terjadinya risiko kecil, karena bagian adminstrasi akan melakukan pemeriksaan dan melakukan pencocokan permohonan dan memisahkan yang syaratnya memenuhi untuk dapat dilaporkan dan disurvey.	Risiko dapat dikelola dengan melakukan pelaporan semua permohonan kredit kebagian administrasi dengan lebih teliti.
4.	Kelemahan dalam pemeriksaan kelengkapan	Skala Risiko : LOW Kemungkinan terjadi sedikit karena pemeriksaan berulang	Skala Risiko : LOW Dampak risiko rendah karena kelengkapan syarat sesuai formulir	Risiko dapat diterima karena pengecekan kembali dilakukan dan kelengkapan dapat

	syarat formulir permohonan kredit pada survey pendahuluan	dilakukan oleh bagian administrasi dan pengecekan oleh AO	permohonan masih dapat dilengkapi saat survey selanjutnya dilakukan.	dilengkapi saat survey lapangan dilakukan.
5.	Kelemahan dalam pelaksanaan survey kredit tanpa disertai surat penugasan dari bank	Skala Risiko : HIGH Risiko terjadi disetiap pelaksanaan survey lapangan dilakukan	Skala Risiko : LOW Dampak risiko rendah, karena kemungkinan fraud dan error yang terjadi rendah ditandai dengan survey kredit yang tetap berlangsung dengan hanya memperlihatkan <i>ID CARD</i>	Risiko dapat dikelola dengan melaksanakan pembuatan surat tugas saat survey dilakukan dan menugaskan petugas yang cekatan dan jujur dan dapat bertanggung jawab ketika survey dilakukan
6.	Ketidaklengkapan persyaratan informasi data calon debitur	Skala Risiko : LOW Kemungkinan risiko kecil terjadi karena adanya pengecekan berlapis oleh AO dan kelengkapan dapat dilengkapi saat survey lapangan	Skala Risiko : MEDIUM Dampak risiko sedang karena kelengkapan syarat dokumen dipenuhi dengan membandingkan data yang ada diformulir dengan yang ada dilapangan secara lengkap. Hal ini termasuk karakteristik debitur perkreditan	Risiko dapat diterima karena jarang terjadi. Petugas survey kredit juga dibantu oleh kabag atau komite kredit untuk proses ini. Tim survey yang turun ke lapangan juga meninjau relasi calon debitur dengan lingkungan yang ada disekitar.
7.	Kelemahan dalam pengecekan data calon debitur yang jelas dan lengkap ke SID BI	Skala Risiko : LOW Kemungkinan terjadi kecil karena persyaratan yang diperiksa ke SID BI dan bank lainnya adalah bersifat lengkap dan jelas.	Skala Risiko : MEDIUM Dampak risiko sedang karena admin kredit yang melakukan pemeriksaan informasi ini dapat menghubungi pihak SID BI dan bank lain jika ada informasi yang masih kurang terkait debitur.	Risiko dapat diterima karena kesalahan informasi jarang diperoleh dari SID BI dan bank lainnya. Informasi terkait debitur yang diperoleh bersifat aktual dan akurat.
8.	Kesalahan pertanggungjaban dalam pelaksanaan analisa kredit	Skala Risiko : LOW Kemungkinan terjadinya risiko kecil terkait informasi data debitur.	Skala Risiko : MEDIUM Dampak risiko sedang dikarenakan analisis kredit dilakukan pada setiap plafond kredit dan hal ini mempengaruhi rekomendasi keputusan dapat dilanjutkan atau tidak.	Risiko dapat diterima karena risiko jarang terjadi. Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan kredit dapat diperiksa dengan lebih teliti lagi.

9.	Ketidakteletian pengkajian semua data terkait permohonan kredit	Skala Risiko : LOW Kemungkinan risiko terjadi kecil karena data dan dokumen yang diperiksa akan diperiksa lagi kebenarannya, keaslian dan keabsahan hukumnya.	Skala Risiko : LOW Dampak risiko kecil karena kemungkinan terjadinya rendah dengan adanya pemeriksaan oleh komite kredit	Risiko dapat diterima dokumen yang diperiksa akan diperiksa lagi kebenarannya.
10.	Kesalahan dalam pertimbangan persetujuan atau penolakan kredit	Skala Risiko : LOW Kemungkinan terjadinya risiko kecil karena adanya rekomendasi dari bagian komite kredit yang rekomendasinya dituangkan dalam Nota Rekomendasi Kredit.	Skala Risiko : MEDIUM Dampak risiko sedang karena NRK dapat mengakibatkan kesalahan pengikatan perjanjian kredit.	Risiko dapat diterima karena NRK masih merincikan pernyataan persetujuan kredit beserta ketentuan – ketentuan lainnya.
11.	Kesalahan dalam pertimbangan persetujuan oleh komisaris terkait permohonan yang melebihi batas kewenangan direksi	Skala Risiko : LOW Kemungkinan terjadi risiko kecil karena komisaris melakukan pemeriksaan atas rekomendasi yang telah diberikan oleh komite kredit	Skala Risiko : MEDIUM Dampak risiko yang terjadi dinilai sedang karena apabila komisaris tidak mengetahui dengan jelas debitur dan tanpa melihat rekomendasi komite kredit maka persetujuan dianggap kurang tepat.	Risiko dapat diterima karena hal ini jarang terjadi tanpa pemeriksaan dan melihat rekomendasi komite kredit.
12.	Ketidakteletian pemeriksaan dokumen – dokumen terkait perjanjian kredit	Skala Risiko : LOW Kemungkinan terjadi sangat kecil karena bagian administrasi kredit melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen – dokumen terkait pengikatan persetujuan kredit	Skala Risiko : LOW Dampak risiko yang terjadi rendah karena dilakukannya pemeriksaan dokumen oleh administrasi kredit	Risiko dapat diterima karena pemeriksaan secara teliti dilakukan oleh administrasi kredit
13.	Kelemahan hukum dokumen – dokumen pengikatan kredit	Skala Risiko : LOW Kemungkinan terjadi kecil karena dokumen – dokumen yang dipersiapkan telah secara teliti dibuat dan sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku	Skala Risiko : MEDIUM Dampak risiko yang muncul dinilai sedang karena pengikatan kredit dibawah tangan dan yang menggunakan akta notaris kedua – duanya bersifat legal	Risiko dapat diterima dengan lebih teliti dalam pembuatan dokumen pengikatan kredit dan dapat menjelaskan ke debitur terkait legalisasi dokumen – dokumen terkait perjanjian kredit

14.	Kesalahan dalam pembuatan slip pencairan kredit berdasarkan pengecekan kembali data pencairan kredit	Skala Risiko : LOW Jarang terjadi karena dilakukannya pemeriksaan pada saat kredit akan dicairkan	Skala Risiko : LOW Dampak risiko sangat rendah karena berkaitan erat dengan kredit yang akan dicairkan. Sebab itu dilakukan pemeriksaan ulang	Risiko dapat diterima karena slip pencairan kredit yang akan dikeluarkan wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
15.	Kelemahan dalam pengarsipan dokumen – dokumen asli dan dokumen cadangan oleh bagian administrasi	Skala Risiko : MEDIUM Risiko dapat terjadi dalam batas yang wajar seperti salah penempatan dokumen asli atau <i>copy</i> dalam map debitur	Skala Risiko : LOW Dampak risiko kecil karena dapat dilakukan pengecekan kembali pada map debitur dan brankas kabag operasional lalu diadministrasikan kembali.	Risiko dapat diterima karena dokumen – dokumen asli disimpan dalam brankas yang diotorisasi oleh Kabag Operasional
16.	Kelemahan dalam penyimpanan berkas asli oleh kabag operasional	Skala Risiko : LOW Kemungkinan risiko terjadi kecil karena berkas asli yang disimpan di brankas sebelumnya telah diadministrasikan oleh bagian administrasi.	Skala Risiko : MEDIUM Dampak risiko dinilai sedang karena kemungkinan dokumen asli tercecer atau hilang.	Risiko dapat di diterima karena pengecekan berkas asli dapat diperiksa di bagian administrasi.

Dari tabel *Likelihood and Impact Internal Risk* yang diantaranya memuat internal risk, kemungkinan terjadinya risiko, dampak risiko serta pemetaan nya menghasilkan pemetaan risiko – risiko yang dikelompokkan dalam sembilan are seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.2 Diagram Pemetaan Risiko

LIKELIHOOD OF RISK	HIGH	5		
	MED	2,3,15		
	LOW	1,4,9,12,14,	6,7,8,10,11,13,16	
		LOW	MED	HIGH
		IMPACT		

Dari diagram pemetaan risiko dapat disimpulkan bahwa area dengan risiko terbanyak terdapat pada area berwarna hijau *Likelihood Low, Impact Medium*. Area berwarna hijau menggambarkan risiko yang masih dapat diterima, hal ini berarti kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko bernilai minimal tetapi memiliki dampak sedang pada perusahaan.

5. KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Penelitian yang dilakukan mengenai penerapan *Risk – Based Audit* pada bagian kredit dalam mengevaluasi proses kredit pada BPR Karyabhakti Ugahari Tanjung Morawa dilakukan dengan pemetaan *internal risk* yang diperoleh dari identifikasi proses dan prosedur perkreditan BPR lalu kemudian dibagi dalam tahapan – tahapan perkreditan yang akan diidentifikasi risiko – risiko yang muncul. Risiko berdasarkan kriteria pengukuran risiko dan penilaian risiko diperoleh dari kertas kerja penelitian terdahulu yang merujuk pada informasi narasumber. Kertas kerja yang dibuat kemudian dilanjutkan hingga tahap analisis peranan *Risk – Based Audit* dalam pemetaan risiko dengan menggunakan kategori unsur risiko *likelihood dan impact internal risk*. Hal ini dilakukan untuk memperoleh *critical problem area* pada BPR KBU. Area yang diperoleh dari pemetaan dan memiliki nilai risiko terbesar yang disebut sebagai *critical problem area*. Berdasarkan hal ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Critical problem area* yang diperoleh dari tabel kemungkinan penilaian risiko pada setiap tahapan perkreditan BPR menyatakan bahwa *critical problem area* dengan nilai terbesar berada pada tahapan penilaian permohonan perkreditan dengan nilai 1,25 dari jumlah opini 5 dibagi dengan scope risiko 4.
2. *Critical problem area* ditahapan penilaian permohonan perkreditan disebabkan oleh risiko yang muncul dengan skala medium pada scope pelaksanaan survey kredit yang dilakukan tanpa surat penugasan dari

kantor dan hanya menggunakan *ID CARD* petugas. Selanjutnya, tahapan persiapan, tahapan pemutusan, tahapan realisasi dan tahapan penatausahaan berada di area hijau atau skala low yang menunjukkan tidak adanya ancaman dari area ini.

Dari diagram pemetaan risiko yang disajikan dengan melihat tabel *likelihood dan impact internal risk*, diperoleh bahwa area dengan risiko terbanyak terdapat pada area berwarna hijau yang menggambarkan risiko masih dapat diterima oleh perusahaan, dampak yang diterima sedang dan masih dapat dikendalikan. Hal ini juga menggambarkan bahwa pengendalian internal di BPR KBU terbilang baik melihat tidak ada risiko – risiko yang berada di area berwarna merah. Area terbanyak terdapat di area berwarna hijau, dan di susul oleh area berwarna kuning yang risikonya butuh pengendalian dan perbaikan agar pengelolaan risiko menjadi lebih baik.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan beserta kesimpulannya, saran yang direkomendasikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Membuat surat penugasan dalam pelaksanaan survey kredit dilapangan dengan menugaskan petugas survey yang ditunjuk langsung oleh kabag kredit yang bertanggung jawab penuh dan independen dalam melaksanakan survey dilapangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kerjasama dalam memanipulasi data kredit oleh petugas dan debitur.
2. Rutin melaksanakan pelatihan kerja yang tepat untuk terus meningkatkan kemampuan pekerja agar lebih terampil guna mengatasi adanya *human error* didalam perusahaan.

6. REFERENSI

- Bank Indonesia (1998) 'Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan', *UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 tentang Perbankan*, (Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia), doi: 10.1007/s13398-014-0173-7.2.
- Bank Indonesia (2011) 'Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011', 158–358.
- Bratanovic, G. (2011) *Analisis Risiko Perbankan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunil, Z. (2005) *Bank Auditing Risk - Based Audit Dalam Pemeriksaan Perkreditan Bank Umum*. Jakarta: PT. INDEKS.
- Febrina, Y. (2011) 'Penerapan Audit Berbasis Risiko di Bank Muamalat'. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasibuan, M. S. (2011) *Dasar - Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasmir (2014) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kumaat G, V. (2011) *Internal Audit*. Edited by S. Suryadi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nisa' Mustikawati, T. dan D. (2003) 'Penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet'.
- 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum' (2009).
- Singgih, H. R. *et al.* (2012) 'Kajian Sistem Pengendalian Risiko Kredit Dalam Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko (Kasus Pada Kantor Cabang Bank)', *Jurnal Manajemen & Agribisnis* 9(1) : 23 - 30
- 'Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum' (2003), 30(5) : 29–32.
- 'Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP Perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum' (2004), (5).
- Tampubolon, R. (2004) *Risk Management*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____. (2005) *Risk and System-Based Internal Auditing*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wilina, E. (2008) 'Penerapan Risk Based Audit pada Bagian Kredit untuk Mengevaluasi Proses Kredit dengan Memetakan Internal risk PT. BPR "XXX" Lumajang'. *Skripsi*. Universitas Surabaya. (Tidak Dipublikasikan)
- Situmeang, C., & HABIBI, M. R. (2018). *Governance Based on Cost Analysis (Unit Cost Analysis for Vocational Schools)*. *Journal of Arts and Humanities*, 7(2), 33 - 43
- Situmeang, C. (2014). *Manajemen Keuangan*. Unimed Press. Medan

<http://www.ojk.go.id>

<http://www.bi.go.id>

<https://www.expertprogrammanagement.com/2009/06/visualise-risks-using-a-risk-map/>